

ABSTRAK

Akses universal terhadap listrik merupakan komponen kebutuhan dasar yang masih belum dimiliki oleh sekelompok masyarakat dalam piramida ekonomi terbawah, terlebih di negara-negara berkembang. Kerentanan ini mengarah kepada kondisi kemiskinan energi sehingga mendesak Pemerintah sebagai pemangku kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak atas akses listrik. Elektrifikasi rural menjadi salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan energi, dengan berbagai aktor yang terlibat dan jenis pendekatan – baik berbasis kebutuhan, hak dan pasar.

Indonesia memiliki rasio elektrifikasi yang sudah mencapai 98,8% di 2019, namun terdapat permasalahan ketidakmerataan elektrifikasi di beberapa daerah, khususnya Indonesia bagian timur. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia menyambut inisiatif HIVOS sebagai organisasi pembangunan internasional untuk menggagas program elektrifikasi rural bernama *Sumba Iconic Island* (SII) di tahun 2011. Dalam implementasinya, tiap aktor yang terlibat dalam program elektrifikasi rural ini memiliki preferensi sendiri dalam menggunakan pendekatan berbasis hak, pasar maupun kebutuhan sesuai dengan kepentingan dan tujuan politisnya. Penelitian ini memosisikan SII menjadi studi kasus dari program elektrifikasi rural di Indonesia yang memiliki dinamika pendekatan berbasis hak dan pasar yang mengarah pada transformasi pemangku kewajiban dalam pemenuhan akses energi untuk masyarakat di Sumba. Lewat konsep pendekatan berbasis hak dan pasar, penelitian ini akan menganalisis dinamika pendekatan elektrifikasi rural yang tidak hanya berkontestasi satu sama lain, namun terdapat bentuk dinamika lain antara dua pendekatan ini. Studi kasus ini diharapkan menjadi acuan pola relasi aktor pemerintah dengan dinamika pasar, baik untuk program elektrifikasi rural di Indonesia maupun program pembangunan pada umumnya.

Kata Kunci: *Elektrifikasi Rural, Pendekatan Pembangunan, Pemangku Kewajiban, Bottom of Pyramid, Pendekatan Berbasis Hak, Pendekatan Berbasis Pasar*

ABSTRACT

Universal access of electricity is one of the basic needs that has not been owned by the people in the bottom of pyramid, specifically in developing countries. The vulnerability leads to energy poverty therefore urging the Government as a duty bearer to fulfill the right to access electricity. Rural electrification is one of the strategy to alleviate energy poverty, with a variety of actors involved and types of approaches - both based on needs, rights and market.

Indonesia has an electrification ratio that already reached 98.8% in 2019, despite the electrification inequality still existed in several regions, especially eastern Indonesia. To respond the situation, the Government of Indonesia welcomed HIVOS' initiative, an international development organization, to initiate a rural electrification program called *Sumba Iconic Island (SII)* in 2011. Within its implementation, each actor involved in the rural electrification program has their own preferences in using a rights-based approach, market-based approach and needs-based approach according with their political interests and goals. This research put SII as a case study of Indonesia's rural electrification program along with its approaches dynamic, rights-based and market-based. The approaches dynamics will lead to the stakeholders role's transformation in fulfilling energy access for people of Sumba. Through the concept of a rights-based and market-based approach, this study will open up the discourse about the opportunity of any dynamics within the rural electrification approach. The dynamic forms will not be limited in contestation since the implementation will be showing other forms of dynamics between these two approaches. This case study is expected to be a reference for the government and market dynamics, both for rural electrification programs in Indonesia and in development programs.

Keywords: *Rural Electrification, Development Approach, Duty Bearer, Bottom of Pyramid, Right-based approach, Market-based Approach*